

BAB III

METODA PENELITIAN

3.1. Strategi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada penelitian ini penulis hanya memaparkan gejala sosial dan fenomena-fenomena yang terjadi selama penelitian berlangsung. Alasan penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, karena dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa kata-kata dari hasil wawancara dan bukan pada angka-angka.

Menurut Anggito dan Setiawan (2018:8) Penelitian Kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data di lakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif /kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian di interpretasikan. Biasanya berhubungan dengan masalah sosial dan manusia yang bersifat *interdisipliner*, fokus pada *multi method*, *naturalistik* dan *interpretatif* (dalam pengumpulan data, paradigma, dan interpretasi). Merupakan Penelitian yang menggunakan pendekatan induksi yang mempunyai tujuan penyusunan konstruksi teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta merupakan penelitian yang menggunakan paradigma kualitatif.

Kountur (2004:105) penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa kata-kata dari hasil wawancara. Semua data yang dikumpulkan menjadi kunci terhadap apa yang akan diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran

penyajian laporan tersebut. Data yang diambil berasal dari wawancara, catatan lapangan, dokumen, catatan atau memo.

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi Penelitian

Populasi merupakan totalitas semua nilai-nilai yang mungkin daripada karakteristik tertentu sejumlah objek yang ingin dipelajari sifatnya. Muri (2017:147). Menurut Muri (2017:148) Populasi dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu:

- a. Populasi terbatas (*definite*), yaitu objek penelitian yang dapat dihitung seperti luas area sawah, jumlah ternak, jumlah murid dan jumlah mahasiswa.
- b. Populasi tidak terbatas (*indefinite*), yaitu objek penelitian yang mempunyai jumlah tak terbatas, atau sulit dihitung jumlahnya seperti tinta, air, pasir dipantai dan padi disawah.

Populasi Penelitian yang ditetapkan oleh peneliti adalah berdasarkan populasi terbatas yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3.2.2. Sampel Penelitian

Sampel Penelitian yang peneliti tetapkan adalah Satuan Kerja Biro Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Sekretariat Direktorat Jenderal PDSPKP, dan Inspektorat Jenderal. Biro Keuangan dipilih sebagai sampel penelitian karena Biro Keuangan merupakan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi utama menyusun Laporan Keuangan tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Biro Keuangan terdapat Pejabat Pengelola Keuangan, Pejabat Penyusun Laporan Keuangan, Pejabat Penyusun Laporan Barang Milik Negara dan Petugas Penyusun Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Sekretariat Direktorat Jenderal PDSPKP di pilih menjadi sampel karena dalam kedua unit kerja tersebut terdapat Kepala Bagian Keuangan dan Umum yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penyusun laporan keuangan dan laporan barang milik negara ditingkat

Eselon I. Sampel penelitian terakhir adalah Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal dipilih menjadi sampel karena Inspektorat Jenderal merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas melakukan pengawasan atas setiap kegiatan, APIP akan mendampingi unit kerja dalam pengendalian internal dalam setiap tahapan siklus anggaran mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban dalam laporan keuangan. Pada Inspektorat Jenderal terdapat Inspektur I dan 5 yang merupakan Mitra Pegawai Internal dalam tugas dan fungsi penyusunan Laporan Keuangan, untuk itu peneliti akan menjadikan Inspektur I dan auditor sebagai informan penelitian. Dengan penentuan sampel penelitian tersebut, peneliti berharap mendapatkan hasil maksimal sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai.

3.3. Data dan Teknis Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian. Suwendra (2018:59) menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Menurut Fitrah & Luthfiyah (2018:61) dalam penelitian kualitatif manusia (peneliti) menjadi instrumen utama dalam proses pengumpulan data di lapangan tidak ada alat yang paling elastik untuk mengungkapkan data kualitatif kecuali peneliti itu sendiri, artinya manusia sebagai instrumen kunci adalah peneliti sebagai pengumpul data utama. Dalam penelitian kualitatif, data masih belum diketahui, sumber data belum teridentifikasi secara jelas/pasti, cara-cara menggali data belum diketahui, baik dalam eksploitasi maupun mengungkap data sehingga keberadaan alat pengumpul data pokok betul-betul sangat dibutuhkan.

Menurut Sugiyono (2017:224) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Beberapa teknik pengumpulan data menurut Muri, (2017:372) adalah Wawancara, Observasi dan Dokumen. Teknik wawancara memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut:

1. Berhubung karena pewawancara langsung menemui responden, maka *response rate* juga lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan kuisioner. Apabila sumber informasi yang tidak berada di tempat, dapat diulangi kembali pada waktu berikutnya.
2. Sampel penelitian lebih sesuai dengan rencana karena semua sumber informasi akan dapat ditemui, kalau peneliti dapat menunggu kapan sumber informasi mau dan siap memberikan informasi
3. Dapat mengumpulkan informasi pelengkap yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian atau analisis pada penyusunan laporan hasil penelitian.
4. Visualisasi informasi dapat disajikan dan pewawancara dapat memberikan respons dan meminta informasi lebih terperinci dan terarah pada fokus persolaan

Atas pertimbangan tersebut maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Teknik wawancara memiliki beberapa jenis yaitu wawancara terencana-terstruktur, wawancara terencana-tidak terstruktur dan wawancara bebas. Muri (2017:376). Peneliti menggunakan jenis wawancara terencana-terstruktur untuk mendapatkan *response* dari informan dalam penelitian ini.

Muri (2017:376) menyatakan bahwa wawancara terencana-terstruktur adalah suatu bentuk wawancara dimana pewawancara dalam hal ini peneliti menyusun secara terperinci dan sistematis rencana atau pedoman pertanyaan menurut pola tertentu dengan menggunakan format yang baku. Dalam hal ini pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan kemudian mencatat jawaban sumber informasi secara tepat.

Wawancara terencana-terstruktur akan dilakukan terhadap beberapa informan sebagai berikut:

- (1) Pejabat pengelola anggaran yakni Kepala Biro Keuangan dan Inspektur I pada Inspektorat Jenderal sebagai informan utama.
- (2) Pejabat penanggungjawab penyusun Laporan Keuangan tingkat Kementerian dan Eselon I yakni Kepala Bagian Akuntansi, Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian, Kepala Bagian Keuangan dan Umum Ditjen PDSPKP, dan Kepala Bagian Keuangan dan Umum Ditjen Perikanan Tangkap sebagai informan pendukung.
- (3) Auditor pada Inspektorat V yang menangani penyusunan Laporan Keuangan sebagai informan pendukung.
- (4) Pejabat pelaksana pengendalian kepatuhan dan resiko laporan keuangan sebagai informan pendukung.
- (5) Pelaksana Penyusun Laporan Keuangan tingkat Kementerian pada Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai informan pendukung.

Berikut adalah nama-nama informan yang akan di wawancara oleh peneliti:

Informan	Nama	Jabatan
Informan 1	Cipto Hadi Prayitno	Kepala Biro Keuangan
Informan 2	Darmadi Aries	Inspektur I pada Inspektorat
Informan 3	Hendry Manaf	Kepala Bagian Pengelolaan BMN Kementerian
Informan 4	Maria Laurentia Liana	Kepala Bagian Akuntansi Kementerian
Informan 5	Minuk Irawati	Kepala Bagian Keuangan dan Umum Direktorat Jenderal PDSPKP
Informan 6	Sofiyanto	Kepala Bagian Keuangan dan Umum Ditjen Perikanan Tangkap
Informan 7	Ono Juarno	Auditor Madya Inspektorat
Informan 8	Rachmad Manurung	Auditor Muda Inspektorat Jenderal
Informan 9	Martha Lusia Pasaribu	Kepala Subbagian Kepatuhan dan Resiko Laporan Keuangan
Informan 10	Wisnu Danang Saputro	Pelaksana Penyusun Laporan Keuangan

Sedangkan indikator pertanyaan wawancara penelitian yang akan diberikan kepada informan dalam mencapai tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel.3.1. Indikator Pertanyaan Wawancara Penelitian

No	Variabel	Indikator Penelitian	Nomor Butir
A.	Anggaran	1. Pemahaman Makna Anggaran	1.1. & 1.2.
		2. Perencanaan Anggaran di KKP	2.1. - 2.6.
		3. Penetapan Anggaran di KKP	3.1.
		4. Pelaksanaan Anggaran di KKP	4.1. - 4.6.
		5. Pertanggungjawaban Anggaran di KKP	5.1. - 5.5.
		6. Keterkaitan Anggaran dengan Keandalan Laporan Keuangan	6.1. - 6.2.
B.	Kompetensi	1. Pemahaman Makna Kompetensi Pegawai	1
		2. Kebutuhan Kompetensi Pegawai di KKP	2
		3. Pengendalian Internal Penentuan Kompetensi Pegawai di KKP	3
		4. Upaya Peningkatan Kompetensi Pegawai di KKP	4
		5. Keterkaitan Kompetensi Pegawai dengan Keandalan Laporan Keuangan	5
C.	Bagan Akun Standar	1. Pemahaman Makna Bagan Akun Standar	1 - 2
		2. Proses Penentuan Bagan Akun Standar di KKP	3 - 4
		3. Pengendalian Internal Penentuan Bagan Akun Standar di KKP	5
		4. Keterkaitan Bagan Akun Standar dengan Keandalan Laporan Keuangan	6
D.	Keandalan Laporan Keuangan	1. Pemahaman Makna Keandalan Laporan Keuangan	1
		2. Faktor Dominan diantara Anggaran, Kompetensi Pegawai dan Bagan Akun Standar yang berpengaruh pada Keandalan Laporan Keuangan	2 - 4

3.4. Metoda Analisis Data

Menurut sugiyono (2017;245) Analisis data kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Sedangkan menurut Moleong, (2000:103) Analisis data kualitatif adalah Proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu atau kelompok tertentu dalam suatu konteks setting tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh komprehensif dan holistik.

Proses pengolahan data kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil Wawancara berupa rekaman dengan para informan diproses menjadi transkrip wawancara menggunakan media komputer dengan microsoft office versi 2016.
2. Hasil transkrip wawancara yang menjadi hasil penelitian dari seluruh informan akan dibuat rangkuman untuk mengkaitkan variabel penelitian dengan tujuan penelitian.
3. Rangkuman hasil transkrip akan dilakukan interpretasi oleh peneliti untuk kemudian dijadikan kesimpulan pada pokok bahasan selanjutnya.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan September 2019 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Sejarah dan Profil Kementerian Kelautan dan Perikanan

4.1.1. Sejarah

Sejak era reformasi bergulir ditengah percaturan politik Indonesia, sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti merebaknya beragam krisis yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan Orientasi Pembangunan. Dimasa Orde Baru, orientasi pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan. Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya.

Potensi sumberdaya tersebut terdiri dari sumberdaya yang dapat diperbaharui, seperti sumberdaya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai, energi non konvensional serta energi sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumberdaya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumberdaya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya.

Tentunya inilah yang mendasari Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam Kabinet Periode 1999- 2004 mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri Eksplorasi Laut. Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.

Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999.

Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur DELP menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Kemudian berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

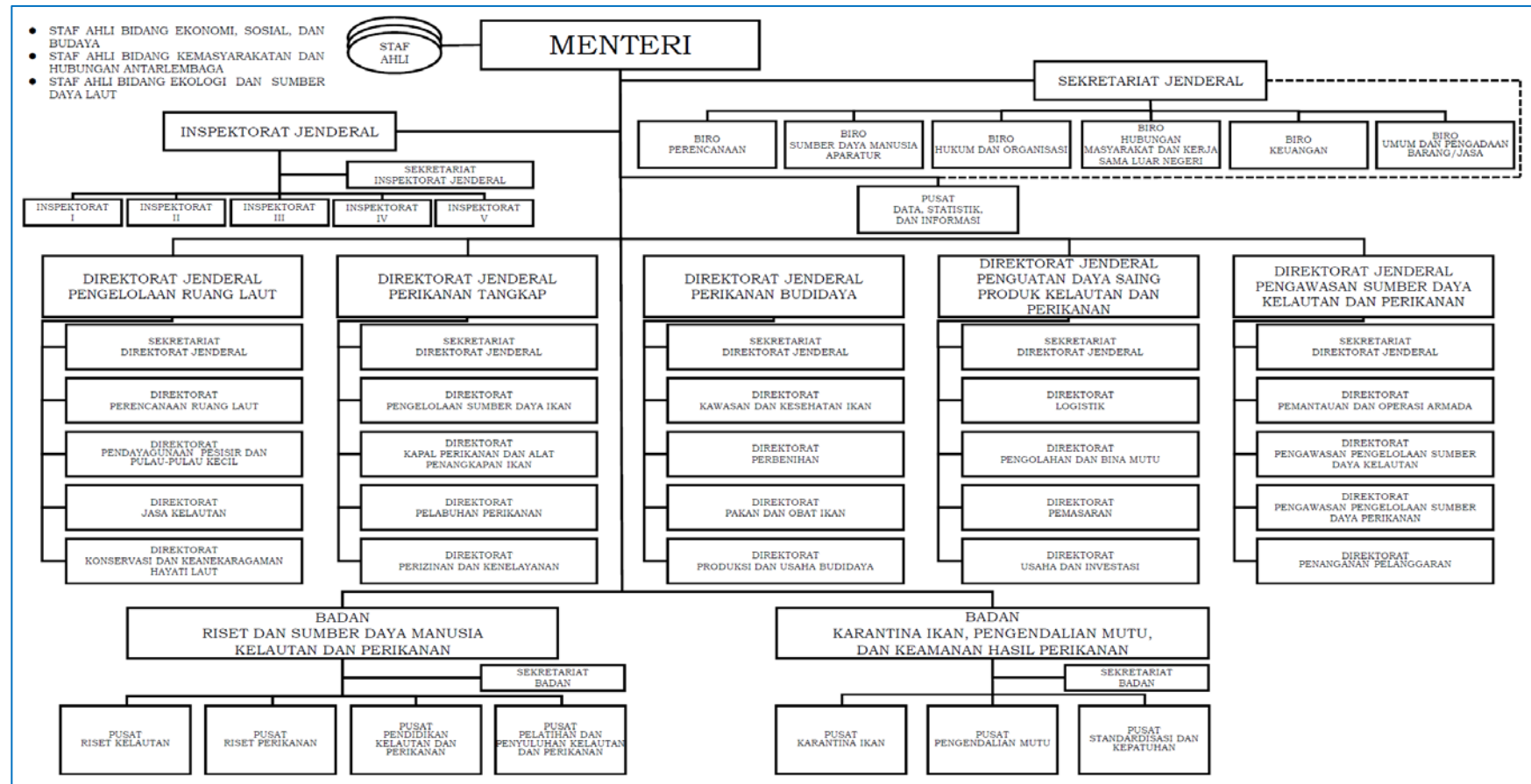
4.1.2. Profil

Terbentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan pada dasarnya merupakan sebuah tantangan, sekaligus peluang bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Artinya, bagaimana KKP ini menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor andalan yang mampu mengantarkan Bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Setidaknya ada beberapa alasan pokok yang mendasarinya. Pertama, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 dan garis pantai sepanjang 81.000 km tidak hanya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tetapi juga menyimpan kekayaan sumberdaya alam laut yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Kedua, selama beberapa dasawarsa, orientasi pembangunan negara ini lebih mengarah ke darat, mengakibatkan sumberdaya daratan terkuras. Oleh karena itu wajar jika sumberdaya laut dan perikanan tumbuh ke depan. Ketiga, dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya kesadaran

manusia terhadap arti penting produk perikanan dan kelautan bagi kesehatan dan kecerdasan manusia, sangat diyakini masih dapat meningkatkan produk perikanan dan kelautan di masa datang. Keempat, kawasan pesisir dan lautan yang dinamis tidak hanya memiliki potensi sumberdaya, tetapi juga memiliki potensi bagi pengembangan berbagai aktivitas pembangunan yang bersifat ekstraksi seperti industri, pemukiman, konservasi dan lain sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 6/Permen-Kp/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan Struktur Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan



Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Anggaran

Hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai pemahaman tentang anggaran mulai dari makna anggaran sampai dengan keterkaitan anggaran dengan kenadalan laporan keuangan didapat hasil sebagai berikut:

Menurut informan 1 terkait dengan anggaran

“anggaran merupakan kebutuhan dana yang direncanakan untuk digunakan dalam membiayai semua kebutuhan operasional rutin Kementerian maupun kegiatan prioritas untuk mencapai tujuan jangka pendek atau tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang.” ...“pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai dengan program jangka menengah yang sudah di sepakati oleh DPR pastinya akan membuat pertanggungjawaban anggaran menjadi kurang baik, akhirnya apa ?... saya bisa pastikan akan banyak penyesuaian akuntansi disana dan jika itu terjadi pasti auditor BPK akan curiga ada apa? Kenapa penyesuaiannya banyak?... ini pasti akan mempengaruhi keandalan saat laporan keuangan akan diterbitkan”.

Pernyataan informan 1 diperkuat oleh informan 2 mengenai anggaran adalah

“anggaran itu dikementerian lembaga atau di KKP terkait dengan pemerintah tentu terkait dengan APBN, tertuang di dalam PP 90 Tahun 2010. APBN merupakan rencana keuangan yang disusun secara tahunan oleh pemerintah negara yang tentunya disetujui oleh anggota DPR.”... “dalam anggaran yang perlu diperhatikan bukan hanya pada tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban tetapi seharusnya lebih ditekankan pada tahap perencanaannya, supaya nanti penyajian laporan keuangannya bisa andal...”

Sedangkan pernyataan tegas oleh informan 5 mengenai anggaran adalah

“... laporan keuangan itu kita harus menyajikan kondisi sesuai fakta-fakta yang ada kemudian di terapkan. Maka laporan keuangan itu bisa dinilai keandalannya. Maksudnya jika terjadi perubahan anggaran perlu juga diuraikan penyebabnya supaya penyusun laporan keuangan tidak keliru mengartikan fakta-fakta yang akan disajikan”.

Dari seluruh informasi diatas dapat dijelaskan bahwa anggaran pada prinsipnya adalah rencana keuangan yang disusun baik dengan tujuan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang untuk digunakan dalam membiayai kebutuhan operasional pemerintah yang ditetapkan melalui mekanisme kesepakatan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Penyajian tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran dalam laporan

keuangan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada sehingga laporan keuangan dapat dinilai dengan andal.

4.2.2. Kompetensi Pegawai

Hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai pemahaman kompetensi pegawai hingga keterkaitan kompetensi pegawai dengan keandalan laporan keuangan diuraikan sebagai berikut:

Informasi yang diperoleh dari informan 1 mengenai kompetensi pegawai adalah

“kompetensi merupakan kemampuan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpinan, kompetensi bisa saja dipengaruhi oleh tingkat pendidikan.”... “belum seluruhnya sesuai, masih terdapat pegawai-pegawai yang secara kompetensi tidak sesuai, KKP itu kan merupakan Kementerian yang awalnya terbentuk dari Departemen Pertanian dimana pada masa itu pegawai yang bertugas mengelola keuangan banyak yang memiliki disiplin ilmu bukan dari lulusan ekonomi atau tata buku.”... “kompetensi pegawai jika kita menggunakan istilah *the right man on the right place and the right time* pasti akan mempengaruhi keandalan atau kualitas laporan keuangan, sebagai contoh, jika pegawai lulusan akuntansi yang ditugaskan sebagai penyusun laporan keuangan hasilnya hampir dipastikan lebih baik jika dibandingkan dengan pegawai yang bukan dari lulusan akuntansi, lulusan dari akuntansi pemerintahan hampir dipastikan akan lebih maksimal menyajikan laporan keuangan pemerintah jika dibandingkan pegawai yang lulusan dari akuntansi sektor swasta”

Informasi tersebut diperkuat dengan informan 4 yang menyatakan bahwa

“kondisi kompetensi pegawai di KKP belum sepenuhnya sesuai, baik dari latar belakang pendidikan maupun keterampilan,”...padahal maksud dari kompetensi pegawai itu adalah kemampuan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan keterampilan maupun pendidikan yang dimiliki.” ...sebagai contoh dengan kondisi normal seorang pegawai dengan lulusan dari ekonomi atau akuntansi walaupun belum lama bekerja pemahaman tentang bagaimana merencanakan anggaran, melaksanakan anggaran dan mempertanggungjawabkan hampir dipastikan akan berbeda dengan pegawai yang bukan dari dasar pendidikan ekonomi atau akuntansi.... “Kompetensi pegawai menjadi hal penting dan dominan dalam penyajian laporan keuangan yang andal, sebab fakta-fakta atas setiap kejadian dalam transaksi hanya bisa disajikan oleh pegawai yang kompeten.”

Informasi lain menurut informan 10 juga memperkuat dengan menyatakan bahwa

“Kompetensi dapat mempengaruhi keandalan laporan keuangan sebab jika dengan pegawai yang memiliki kompetensi masih berbeda disiplin ilmunya dimungkinkan akan terjadi salah saji dalam penyusunan laporan keuangan, karena pegawai tersebut tidak mengetahui secara pasti substansi yang terjadi atau fakta yang telah terjadi”

Dari berbagai informasi yang ada tentang kompetensi dapat diuraikan bahwa kompetensi pegawai merupakan kemampuan dari pegawai untuk menyelesaikan tugas. Kompetensi merupakan kemampuan yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan. Kompetensi menjadi hal yang dominan dalam mewujudkan keandalan laporan keuangan, sebab dengan kompetensi yang sesuai, penyajian laporan keuangan secara jujur sesuai dengan fakta-fakta, dapat diuji dan netral yang merupakan kriteria andal dapat diwujudkan.

4.2.3. Bagan Akun Standar (BAS)

Beberapa pendapat dari informan terkait dengan pemahaman BAS hingga keterkaitan BAS dengan keandalan laporan keuangan diuraikan sebagai berikut:

Pendapat yang diperoleh dari Informan 1 mengatakan bahwa

“BAS itu kan kodefikasi akun, jadi BAS itu merupakan kumpulan kodefikasi akun pastinya sama yang digunakan bukan hanya KKP tetapi seluruh KL dalam menyeragamkan proses penyusunan anggaran sampai pelaporan keuangan.” ...“penentuan BAS sebaiknya dimulai saat merencanakan anggaran, pegawai sudah mulai memetakan BAS yang akan digunakan dalam anggaran, dan sebaiknya dalam penentuan BAS juga melibatkan pegawai penyusun laporan keuangan dan APIP supaya ketepatan penggunaan BAS dapat lebih terarah”. ...”BAS bisa menjadi faktor yang mempengaruhi keandalan laporan keuangan tergantung pada pegawai yang menerapkan ketentuan BAS itu sendiri. Jika terdapat revisi penggunaan BAS tetapi tidak diungkapkan secara jujur sehingga tidak bisa dilakukan uji oleh verifikator maka laporan keuangan bisa menjadi tidak andal.”

Pendapat informan 1 ditegaskan oleh informan 6 yang menyebutkan bahwa

“BAS memang menjadi salah satu alat pengendalian dan sebaiknya yang menentukan penggunaan BAS adalah ahli ekonomi supaya pada saat perencanaan anggaran dapat terstruktur dengan baik.” ...kejadian yang sederhana saja untuk pembelian pakaian seragam biasanya petugas hanya mengetahui bahwa BAS yang digunakan adalah 52 belanja barang, tetapi jika mau diperhatikan lebih mendetail penggunaan akun dalam BAS yang tepat

adalah 521211 yaitu belanja bahan, kesalahan penentuan BAS ini bisa menjadi fatal jika tidak dilakukan pengendalian internal, untuk itu saat penyusunan atau akan dilakukan revisi biasanya dilakukan persetujuan dari Biro Keuangan, Biro Perencanaan serta di revidi oleh APIP.” ...lebih celaka lagi klo ada perubahan BAS nggak disajikan di LK, bisa jadi salah saji nnt muncul pagu anggaran negatif lah,, bisa jadi LK dinilai nggak andal sama pemeriksa”.

Menguatkan pendapat informan 1 dan 6, informan 7 menyatakan bahwa

“... BAS merupakan kodefikasi yang sudah diatur dalam suatu ketentuan oleh Kementerian Keuangan.” ...BAS berfungsi sebagai alat pengendalian mulai tahap perencanaan anggaran sampai pertanggung jawaban pengelolaan keuangan.” ...”Kondisi di KKP belum semua tertib menerapkan BAS sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut terjadi karena pemahaman antar pegawai belum sama, selain itu karena waktu untuk penentuan BAS saat perencanaan anggaran terlalu sempit sehingga masih sering terjadi revisi atas penerapan BAS.” ...”Revisi atas penggunaan BAS bisa menjadi faktor yang mempengaruhi keandalan laporan keuangan jika setelah dilakukan uji pada saat revidi oleh APIP, petugas tidak dapat jelaskan atau tidak disajikan sesuai fakta yang ada saat disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.”

Dari beberapa pendapat informan mengenai BAS, peneliti menguraikan bahwa BAS merupakan kodefikasi yang diatur dalam suatu ketentuan oleh Kementerian Keuangan. BAS merupakan alat pengendalian proses perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan. Penerapan BAS harus dilakukan oleh pegawai yang kompeten agar tidak terjadi revisi penggunaan BAS. Jika terjadi revisi penggunaan BAS perlu dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan agar tidak menimbulkan kesalahan penyajian yang bisa mempengaruhi keandalan laporan keuangan.

4.2.4. Keandalan Laporan Keuangan

Mengenai Keandalan Laporan Keuangan beberapa informan menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

Pendapat informan 2 mengenai keandalan laporan keuangan adalah

“...laporan keuangan dapat dikatakan andal jika laporan keuangan tersebut dapat diuji dan diungkapkan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi.” ...”Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keandalan laporan keuangan, bisa dari siklus anggaran, bisa karena kompetensi pegawai, bisa karena sistem akuntansi yang saat ini digunakan, atau bisa juga karena ada kepentingan dari

pimpinan entitas. Tetapi semua tergantung pada karakter dari pegawai yang ada, jika pegawai memahami substansi dari setiap pekerjaan yang diberikan secara professional, keandalan laporan keuangan dapat dipastikan terwujud sesuai dengan tujuan akhir KKP.”

Sedangkan informan 4 memperkuat dengan menyatakan bahwa

“... terkait keandalan laporan keuangan sebaiknya dikembalikan lagi pada PP 71 Tahun 2010 dimana kata andal merupakan salah satu karakteristik kualitatif dari laporan keuangan dimana informasi harus bebas dari pengertian yang menyesatkan, dapat diuji dan tidak memihak pada kepentingan manapun.” ...”Pengungkapan atas informasi tergantung dari kompetensi pegawai yang bertugas menyusun laporan keuangan.” ...”Kesalahan-kesalahan pada pelaksanaan anggaran dan penentuan BAS sehingga dilakukan revisi bisa menjadikan laporan keuangan menjadi tidak andal jika pengungkapan atas informasi tidak sesuai dengan fakta-fakta sehingga menyesatkan,” ...”sebaliknya laporan keuangan bisa menjadi andal jika pengungkapan atas informasi sudah sesuai dengan fakta yang ada sesuai dengan batas kewajaran informasi yang akan diungkapkan.” ...”Semua dapat diwujudkan tergantung pada kompetensi pegawai yang akan mengungkapkan.”

Pendapat informan 2 dan informan 4 ditegaskan oleh informan 8 dengan menyebutkan bahwa

“...sebagai auditor pendapat saya keandalan laporan keuangan dapat terwujud jika laporan keuangan dapat diuji sesuai dengan fakta yang terjadi apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” ...”keandalan laporan keuangan berkaitan erat dengan kompetensi dan karakter pegawai yang menyusun laporan keuangan itu sendiri, sebab dengan pegawai yang kompeten penyajian laporan keuangan akan bisa diuji kesesuaiannya terhadap ketentuan yang berlaku dan fakta-fakta yang ada.”...”pengalaman saya audit LK di KKP hampir semua objek revidi yang tugasnya lulusan ekonomi penyajian laporannya bagus maksudnya bisa diuji kebenarannya, sesuai sama dokumen yang ada.”

Dari berbagai pendapat informan tersebut dapat dijelaskan bahwa terkait dengan keandalan laporan keuangan merupakan informasi kualitatif yang seharusnya sesuai dengan fakta-fakta yang ada sehingga bebas dari pengertian yang menyesatkan selain itu informasi tersebut harus bisa diuji kebenarannya. Keandalan laporan keuangan dapat diwujudkan jika pegawai yang menyusun laporan keuangan memiliki kompetensi dalam mengungkapkan informasi.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. SIMPULAN

1. Anggaran dapat mewujudkan laporan keuangan yang andal jika direncanakan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai ketentuan.
2. Kompetensi menjadi hal yang dominan untuk mewujudkan laporan keuangan yang andal, dengan Pegawai yang kompeten dalam merencanakan, melaksanakan dan menyusun pertanggungjawaban anggaran dalam laporan keuangan akan memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya dalam penyajian informasi didalam laporan keuangan.
3. Penerapan BAS yang tepat dapat mewujudkan laporan keuangan yang andal sebab dengan ketepatan tersebut akan mengurangi penyesuaian dalam sistem akuntansi yang diterapkan pada saat penyusunan laporan keuangan

5.2. SARAN

1. Anggaran dapat diperhatikan, sebab dapat mempengaruhi keandalan laporan keuangan.
2. Penempatan pegawai dilingkungan KKP melakukan evaluasi atas hasil perekrutan calon pegawai dan *assessment* pegawai yang khususnya melakukan tugas sebagai perencana anggaran, pelaksana anggaran, dan pertanggung jawaban anggaran agar disesuaikan kompetensinya.
3. Penerapan BAS dilakukan pengendalian secara menyeluruh supaya tidak terjadi kesalahan yang dapat mempengaruhi keandalan laporan keuangan.
4. Perlu adanya sinergi antara semua pihak yang terlibat dalam rangka mewujudkan keandalan laporan keuangan.

5.3. KETERBATASAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENELITIAN SELANJUTNYA.

Penelitian yang dilaksanakan ini terbatas pada penelitian yang ditentukan oleh peneliti. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan faktor laporan kinerja atau penilaian kembali atas Barang Milik Negara (BMN) dalam mewujudkan keandalan laporan keuangan.

DAFTAR REFERENSI

- Aimzhan Tulegenovna Makulova et al. 2015. Theory and Practice of Competency-Based Approach in Education. 2015 *International Education Studies*; Vol. 8. No. 8; 2015 ISSN 1913-9020 E-ISSN 1913-9039 Published by Canadian Center of Science and Education
- Anzilago Marcielle. Bernd Cristina Daniele. Voese Simone Bernardes. 2016. The Labor Market Of The Professionals Of Costs In Paraná: A Study On The Demand. Skills And Competencies Required. *Revista Contemporânea de Economia e Gestão*. Vol 14 – N° 1. ISSN 2178-9258
- Badan Pemeriksa Keuangan – Republik Indonesia. 2016. *Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015*. Nomor 56/LHP/XV/05/2016 : Jakarta
- Badan Pemeriksa Keuangan – Republik Indonesia. 2017. *Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016*. Nomor 60/LHP/XV/05/2017 : Jakarta
- Badan Pemeriksa Keuangan – Republik Indonesia. 2018. *Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017*. Nomor 64/LHP/XV/05/2018 : Jakarta
- Badan Pemeriksa Keuangan – Republik Indonesia. 2019. *Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018*. Nomor 71/LHP/XV/05/2019 : Jakarta
- Bisnis. 2016. *sri mulyani kecewa saat rapat pertanggungjawaban apbn 2015*. Diunduh tanggal 18 Agustus 2019. <http://www.suara.com>
- Denhardt. Robert. B, Denhardt. Janet. V and Blanc Tara A. 2013. *Public Administration: An Action Orientation. Seventh Edition*. Thomson Wadsworth. USA
- Didi Pianda. 2018. *Kinerja Guru: Kompetensi Guru. Motivasi Kerja Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Bojonggenteng: CV Jejak
- Dito Aditia Darma Nasution. 2019. *Akuntansi Sektor Publik (Mahir dalam Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah)*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Djata Baltasar Taruma. 2018. Peran Pendamping Serta Dampak Anggaran Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Terhadap Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Ende. *Jurnal Prilaku dan Strategi Bisnis Vol.6 No.1*: Jakarta: Indonesia.

- Fitrah Muh. dan Lutfiyah. 2017. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif. Tindakan Kelas & Studi Kasus*. CV Jejak: Sukabumi
- Harbone Bernard. Dorontinsky Wiliam. and Bisca Paul M. 2017. *Securing Development Public Finance dan the Security Sector*. World Bank Group: Washington
- Hendra Kariangga. 2017. *Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah. Perspektif Hukum dan Politik*. Depok: Kencana
- Herianti Eva. 2019. Turbulensi Anggaran dan Deviasi Anggaran: Dari Pemerintah Memiliki Kemampuan untuk Mengurangnya?. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*. Vol 5, No. 1, ISSN 2460-3937 Jakarta: Indonesia
- Hindriani Nuning. Hanafi Imam dan Domai Tjahjanulin. 2012. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah. *Wacana – Vol. 15, No. 3 ISSN 1411-0199*. Madiun: Indonesia
- Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang *Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar*
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 110/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang *Tata Cara Usulan Revisi Anggaran Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan*
- Kountur. Ronny. 2004. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Tesis dan Tesis. Edisi Revisi*. Jakarta. Penerbit PPM Manajemen
- Makulova Aimzhan Tulegenovna et al. 2015. *Theory and Practice of Competency-Based Approach in Education*. ISSN 1913-9020. Kazakhstan.
- Maria Constantinescu. *Planning Programming Budgeting Evaluation System As A Decision Support System In Managing Defence Resources*. 2016.
- Moleong Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Penerbit Remaja Rosdakarya
- Mulyono Yumari. 2017. *Strategi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran*. Sleman: Deepublish (Group Penerbitan CV Budi Utama
- Musliichah. 2019. *Bunga Rampai Kearsipan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Nasional. 2014. *Reformasi Birokrasi Harus Mampu Membenahi Sistem*. Diunduh tanggal 17 Agustus 2019, <http://www.beritasatu.com>
- Nurkholis dan Moh. Khusaini. 2019. *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: UB Press.
- Okungbowa Andrew. 2015. *SAP ERP Financial Accounting dan Controlling: Configuration dan Use Management.*; Apress

- Pahala Nainggolan. 2012. *Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba*. Jakarta: Yayasan Bina Intergrasi Edukasi (YBIE)
- Penelitian Sosiologi. 2018. *Data Primer dan Data Sekunder*. Diunduh tanggal 20 Agustus 2019. <http://www.sosiologis.com>
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang *Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang *Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang *Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang *Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang *Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara /Lembaga*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang *Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara /Lembaga*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat*
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2018 tentang *Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan*.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan – Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang *Standar Pemeriksaan Keuangan*.
- Razak Alqadrie. 2018. *Katarak Anggaran: Interaksi dan Simbol Kebijakan Demi Kepentingan Rakyat*. Malang: Wineka Media.
- Roser Manzanera-Ruiza and Isabel Marín-Sanchezb. 2018. Professional competencies in social work education for the third sector in southern Spain. *Social Work Education*. 2018 VOL . 37. NO . 1. 92–107

- Salvatore Schiavo-Campo. 2017. *Government Budgeting dan Expenditure Mangement. Principles and International Practice*. First published: Newyork
- Sejarah. 2015. *Sejarah Kementerian Kelautan dan Perikanan*. Diunduh tanggal 17 Agustus 2019. <https://www.kkp.go.id>
- Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-11819/PB/2017 tentang *Jadwal Rekonsiliasi. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2017 Unaudited serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2017*
- Suwendra I Wayan. 2018. *Metodelogi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial. Pendidikan. Kebudayaan dan Keagamaan*. Lukluk: Nila Cakra.
- Takashi Yamashita et al. 2018. Adult Competencies and Employment Outcomes Among Older Workers in the United States: An Analysis of the Program for the International Assessment of Adult Competencies. *Adult Education Quarterly* 2018. Vol. 68(3) 235–250
- Tirau Adrian Ioan. 2015. Chart Of Accounts. Organizational Tool Into The Corporates. *Academica Brâncuși Publisher, ISSN 2344 – 3685/ISSN-L 1844 - 7007*
- Toman Sony Tambunan. 2016. *Glosarium Istilah Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tommasi Daniel and Allen Richard. 2001. *Managing Public Expenditure: a reference book for transition countries*. OECD Publication Service: France
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Waldi Nopriansyah. 2019. *Hukum Bisnis di Indonesia di Lengkapi dengan Hukum Bisnis dalam Perspektif Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Winaya I Ketut dan Yudartha I Putu Dharmanu. 2018. Desa Membangun: Analisis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017. *JPPUMA Vol.6 (1) (2018): 1-3*: Bali: Indonesia
- Yusuf Muri. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Kencana: Jakarta
- Zamzami Faiz. Faiz Idha Arifin. dan Mukhlis. 2018. *Audit Internal: Konsep dan Praktik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI

Data Pribadi

Nama : Agus Prasetyo
NPM : 12140029
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta Timur. 28 November 1982
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln. Pulau Panaitan II No.84 Rt.03
Rw.014 PERUMNAS III. Arenjaya.
Bekasi Timur. Bekasi – Jawa Barat
Telepon/HP/WA : 0812 1871 6427
Email : myboim28@gmail.com

Pendidikan Formal

SDN 06. Bekasi Timur : Lulus Tahun 1994
SMPN 11. Bekasi : Lulus Tahun 1997
SMAN 1. Bekasi : Lulus Tahun 2000
STIE Indonesia. Jakarta S1-Akuntansi: Lulus Tahun 2005
STIE Indonesia. Jakarta S2-MAK : Tahun 2014 sampai sekarang

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat Kantor : Jalan Medan Merdeka Timur No.16
Jakarta Pusat

Pengalaman Organisasi

2000 – 2005 : Anggota SAKUNTALA STIE Indonesia